Jurnal Riset Bisnis Vol 9 (2) (April 2026) hal: 316 – 340
e - ISSN 2598-005X p - ISSN 2581-0863
e-jurnal: http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/

E-GOVERNMENT DAN SUSTAINABILITY PERFORMANCE: MEDIASI PERSEPSI ANTIKORUPSI DAN MODERASI GOOD PUBLIK GOVERNANCE NEGARA DI ASIA PASIFIK

Rafrini Amyulianthy[1*], Harnovinsah[2], Ameilia Damayanti[3], Fazlida Mohd Razali[4]

[1,2,3] Akuntansi, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

[4] Accounting Research Institute, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Malaysia

*E-mail koresponden: rafrini@univpancasila.ac.id

Diterima 17 Februari 2026, Disetujui 20 April 2026, Terbit 30 April 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dari e-government dan tata kelola publik terhadap kinerja pemerintah berkelanjutan dalam rangka Sustainable Development Goals (SDGs) negara di kawasan Asia Pasifik. Kinerja pemerintah berkelanjutan diukur dengan kerangka Balanced Scorecard yang diadaptasi untuk kinerja sektor publik, yang mengukur hasil pelayanan publik, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan, pengelolaan keuangan, dan dampak kepada publik. Penelitian ini menggunakan data 61 negara di kawasan Asia Pasifik dengan tahun pengamatan 2020-2023 sehingga sampel menjadi 305 observasi, penelitian ini menggunakan data panel regresi analisis untuk menguji pengaruh mediasi dan moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan e-government positif significant terhadap kinerja pemerintah berkelanjutan sehingga menaikkan persepsi antikorupsi di pemerintahan. Persepsi antikorupsi terbukti sebagai mediasi parsial di dalam hubungan pengaruh e-government dan kinerja pemerintah berkelanjutan, karena integritas institusi sebagai transformasi saluran perubahan menuju kinerja berkelanjutan. Selanjutnya, tata kelola publik terbukti memperkuat pengaruh e-government terhadap persepsi antiakorupsi, sehingga transformasi digital dapat memberikan lingkungan governansi yang baik dan kuat. Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan e-government, kualitas pemerintahan dan korupsi ke dalam level kerangka Balaced Scorecard untuk Sektor Publik analisis lintas negara. Secara praktis, penelitian ini menekankan para pembuat kebijakan untuk menyelaraskan transformasi digital dengan perubahan governansi agar mencapai tujuan SDGs 2030.

Kata Kunci: e-government, governansi, antikorupsi, kinerja keberlanjutan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16

Abstract

This study investigates the function of e-government and effective public governance in improving governmental sustainability performance to attain the Sustainable Development Goals (SDGs). A public-sector–adapted Balanced Scorecard (BSC) framework is used to measure how well the government does its job which indicate by results of citizen and public service, internal procedures, learning and growth, financial stewardship, and public impact. This study utilizes balanced panel data from 61 Asia-Pacific nations spanning 2020 to 2023, comprising 305 observations, to conduct panel regression analysis for testing both mediating and moderating mechanisms. The findings show that the adoption of e-government is linked to a decrease in perceived corruption and has a positif significant impact on sustainability performance. The relationship between e-government and sustainability performance is found mediated by corruption, emphasizing the need of institutional integrity as a transmission channel. Additionally, strong public governance increases e-government's ability to combat corruption, indicating that digital transformation only produces the best results under a strong governance framework. By including corruption, governance quality, and e-government into a national-level Balanced Scorecard framework for cross-country analysis, this study adds to the academic literature. In practice, the results emphasis how important it is for policymakers to make sure that digital transformation projects are in line with governance changes to make progress on the 2030 SDGs agenda.

Keywords: E-Government, Governance, Corruption, Sustainability Performance, Sustainable Development Goals

PENDAHULUAN

Percepatan transformasi digital di sektor publik telah menempatkan e-government sebagai salah satu elemen paling penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel (Klischewski & Lessa, 2015; Li & Shang, 2020). Dalam konteks kawasan Asia Pasifik, dinamika digitalisasi berlangsung sangat cepat, terutama pasca pandemi COVID-19 ketika negara-negara di kawasan ini dipaksa memperluas layanan publik berbasis teknologi, meningkatkan integrasi data, dan mempercepat digital public service delivery. Walaupun demikian, terdapat kesenjangan yang sangat luas antara negara maju dan negara berkembang dalam adopsi e-government, kualitas tata kelola publik, serta kemampuan untuk mengurangi risiko korupsi yang menghambat performa pembangunan berkelanjutan (Dhaoui, 2022; Meiyanti et al., 2018; Nurdin et al., 2022; X. Zhao & Xu, 2015).

Korupsi dan lemahnya tata kelola publik masih menjadi isu struktural yang menghambat efektivitas pemerintahan (van Doeveren, 2011; Zattoni & Cuomo, 2008; X. Zhang, 2019). Berbagai laporan Transparency International dan World Governance Indicators menunjukkan bahwa persepsi antikorupsi merupakan refleksi kualitas institusi publik dan memainkan peran kunci dalam keberhasilan pembangunan (Transparency International, 2021). Di saat yang sama, literatur menunjukkan bahwa digitalisasi dan pemanfaatan e-government dapat memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan ruang bagi korupsi melalui otomasi layanan, pengurangan kontak fisik, dan digital traceability (Maria & Halim, 2021, 2025). Namun, hubungan antara e-government, governance, dan persepsi korupsi seringkali tidak linear dan sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi.

Sementara itu, pengukuran kinerja pemerintah dalam penelitian lintas negara cenderung terfragmentasi. Banyak studi hanya berfokus pada indikator ekonomi atau governance, tanpa memberikan gambaran holistik mengenai bagaimana sebuah pemerintahan mencapai pembangunan berkelanjutan (Cruz & Marques, 2014). Balanced Scorecard (BSC) menawarkan pendekatan komprehensif yang menangkap kinerja pemerintah dari perspektif warga negara, proses internal, kapasitas pembelajaran, tata kelola fiskal, hingga dampak publik jangka panjang (Kaplan & Norton, 1991). Penelitian ini mencoba untuk melakukan adaptasi BSC untuk sektor publik, khususnya dengan memasukkan indikator internasional seperti Educational Attainment, Management Practices Index, Global Innovation Index, Government Spending, dan SDG Index,memberikan kerangka evaluasi kinerja yang menyeluruh dan dapat diperbandingkan antarnegara.

Namun demikian, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan e-government, good public governance, dan persepsi antikorupsi ke dalam kerangka Balanced Scorecard untuk menjelaskan sustainability performance pemerintahan, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Sebagian besar penelitian sebelumnya terfokus pada hubungan parsial: misalnya, hubungan e-government dengan CPI (Setyaningrum, 2017), atau governance dengan

SDGs(Kaiser, 2024; Nasser et al., 2022). Belum ada studi komprehensif yang menguji bagaimana variabel-variabel governance saling berinteraksi dan membentuk kinerja berkelanjutan melalui mekanisme mediasi persepsi antikorupsi. Kesenjangan inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh e-government terhadap persepsi antikorupsi di kawasan Asia Pasifik ; (2) melihat pengaruh tata kelola publik terhadap persepsi antikorupsi di kawasan Asia Pasifik; (3) melihat pengaruh persepsi antikorupsi terhadap sustainability performance dari pemerintah di kawasan Asia Pasifik; (4) melihat pengaruh tidak langsung e-government terhadap sustainability performance pemerintah dikawasan Asia Pasifik melalui persepsi antikorupsi; (5) melihat pengaruh e-government yang dimoderasi oleh tata kelola publik terhadap persepsi antikorupsi

Studi ini penting secara akademik dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas literatur dengan mengintegrasikan tiga pilar utama governance: *digital governance, public governance quality,* dan *anticorruption perception* ke dalam satu model komprehensif berbasis Balanced Scorecard. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah di kawasan Asia Pasifik dalam merancang strategi peningkatan performa berkelanjutan berbasis tata kelola publik yang kuat, digitalisasi layanan, dan upaya pemberantasan korupsi. Temuan ini juga relevan untuk memonitor pencapaian Agenda SDGs 2030 serta memperkuat institusi publik.

Ruang lingkup penelitian melibatkan 61 negara Asia Pasifik dengan periode observasi 2020–2025. Variabel-variabel utama diukur menggunakan indikator internasional: E-Government Development Index (UN), Good Public Governance (WGI), Corruption Perceptions Index (TI), Educational Attainment (UNESCO/WB), Management Practices Index (WBES), Global Innovation Index (WIPO), Government Spending (IMF/WB), dan SDG Index (UN SDSN). Pendekatan ini memastikan reliabilitas dan komparabilitas data lintas negara.

Struktur artikel ini terdiri atas lima bagian: (1) Pendahuluan, (2) Literature Review dan Pengembangan Hipotesis, (3) Metodologi Penelitian, (4) Hasil dan Pembahasan, serta (5) Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan.

KAJIAN TEORI

Institutional Theory

Institutional Theory merupakan salah satu kerangka paling berpengaruh dalam kajian administrasi publik, tata kelola, dan pembangunan berkelanjutan. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa organisasi, termasuk pemerintah untuk tidak beroperasi secara bebas, melainkan dibentuk, dibatasi, dan diarahkan oleh struktur institusional yang melingkupinya. Menurut Scott (2014), institusi terdiri atas tiga pilar utama: regulative, normative, dan cognitive, yang secara kolektif menciptakan “aturan main” (*rules of the game*) bagi perilaku aktor dan organisasi.

Dalam konteks pemerintahan, institusi mencakup rangkaian regulasi, sistem hukum, norma budaya birokrasi, nilai profesionalisme, kapasitas SDM, hingga rutinitas administratif yang menentukan bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana pelayanan publik diberikan, dan bagaimana sumber daya negara

dikelola (Mardiasmo, 2005). Biscione et al (2025)menegaskan bahwa kinerja negara sangat bergantung pada kualitas institusinya; institusi yang kuat akan menghasilkan pemerintahan yang stabil, efektif, dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam literatur governance modern, *Institutional Theory* sering digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan variasi kualitas pemerintahan lintas negara. Negara dengan institusi yang kuat memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, birokrasi yang profesional, regulasi yang konsisten, dan budaya integritas yang tinggi (Akbar et al., 2012, 2015). Sebaliknya, negara dengan institusi lemah cenderung menghadapi tantangan besar seperti korupsi, ketidakpastian regulasi, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kegagalan implementasi program publik (Sofyani et al., 2018; Sofyani & Akbar, 2013). Dengan demikian, *Institutional Theory* menawarkan perspektif yang sangat relevan untuk memahami peran tata kelola, digitalisasi sektor publik, dan korupsi dalam menentukan kinerja pembangunan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, *Institutional Theory* memberikan dasar untuk menjelaskan bagaimana e-government, sebagai inovasi teknologi institusional, dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan. Implementasi e-government tidak hanya dipandang sebagai adopsi teknologi informasi, tetapi sebagai strategi institusional untuk memperbaiki pilar regulatif dan kognitif (Li & Shang, 2020). E-government memperkuat transparansi melalui akses informasi digital, mengurangi peluang korupsi melalui otomasi proses dan digital tracing, serta meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pelaporan elektronik (Li & Shang, 2020; M. Zhang & Kaur, 2024). Namun, sebagaimana dijelaskan dalam literatur *Institutional Theory*, keberhasilan e-government sangat bergantung pada kesiapan institusi.

Negara dengan *governance framework* yang kuat cenderung lebih mampu memanfaatkan digitalisasi untuk mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik (Nasser et al., 2022; Zhao and Xu, 2015). Sebaliknya, di negara yang institusinya rapuh, e-government mungkin tidak cukup efektif karena digitalisasi tidak diiringi dengan reformasi kelembagaan yang memadai (Abdulkareem & Mohd Ramli, 2022; Bhaskar et al., 2021).

Kualitas tata kelola publik (*Good Public Governance*) juga merupakan elemen fundamental dalam *Institutional Theory*. Governance yang kuat mencakup *rule of law*, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, akuntabilitas publik, dan kontrol korupsi (Addink, 2019). Institusi yang baik menyediakan struktur insentif positif bagi aparatur negara untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab (X. Zhang, 2019). *Institutional Theory* memandang governance bukan hanya sebagai seperangkat prosedur, tetapi sebagai mekanisme kelembagaan yang membentuk perilaku organisasi dan mempengaruhi hasil akhir pembangunan (Fhima et al., 2023). Oleh karena itu, governance menjadi faktor kritis yang memoderasi atau memediasi hubungan antara digitalisasi dan outcome seperti persepsi antikorupsi serta kinerja berkelanjutan.

Selanjutnya, *Corruption Perception Index* (CPI) dapat dipahami sebagai indikator integritas institusional. Dalam *Institutional Theory*, korupsi dipandang sebagai bentuk kegagalan institusi

dalam menegakkan aturan formal dan norma sosial. Institusi yang lemah, baik dari sisi regulatif maupun normatif, menciptakan peluang bagi aktor untuk menyalahgunakan kewenangan dan merusak legitimasi pemerintah (Gan et al., 2025; Panao, 2022). Karena itu, CPI berfungsi sebagai variabel sentral yang menjembatani kualitas institusi (e-government dan governance) dengan *Sustainability performance*.

Institutional Theory juga menjelaskan hubungan antara institusi dan pembangunan berkelanjutan. *Sustainability performance*, yang diukur melalui SDG Index, merupakan hasil akhir dari efektivitas institusi dalam mengelola sumber daya, mengurangi korupsi, melindungi lingkungan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat kesejahteraan sosial (Husein et al., 2025; Zehri et al., 2024). Negara dengan institusi kuat mampu merancang kebijakan jangka panjang, mengimplementasikan program publik secara konsisten, serta menciptakan iklim inovasi dan partisipasi masyarakat (Del-Aguila-Arcentales et al., 2022). Sebaliknya, institusi yang lemah menyebabkan pembangunan tidak merata, kebijakan tidak efektif, dan kinerja SDGs stagnan.

Dengan demikian, *Institutional Theory* menjadi landasan literatur yang sangat kuat untuk menjelaskan model penelitian ini. Teori ini tidak hanya menyatukan peran e-government, tata kelola publik, dan integritas institusi, tetapi juga memberikan penjelasan logis tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi pada sustainability performance pemerintahan, terutama dalam konteks Asia Pasifik yang memiliki kesenjangan institusional sangat tinggi.

Hipotesis Development

E-government telah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan modern. Melalui digitalisasi layanan publik, pemerintah dapat mengurangi interaksi tatap muka, meminimalkan discretionary power pejabat, serta menciptakan proses administrasi yang lebih objektif dan terstandardisasi. Digitalisasi juga menghasilkan jejak audit elektronik yang memperkuat mekanisme pengawasan dan mempersulit manipulasi data, sehingga peluang penyimpangan birokrasi dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, disseminasi informasi secara terbuka melalui portal digital meningkatkan keterbukaan pemerintah dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi proses pengelolaan anggaran, kinerja birokrasi, serta layanan publik.

Secara teoretis, *Institutional Theory* menjelaskan bahwa adopsi e-government merupakan respons terhadap tekanan regulatif, normatif, dan kognitif untuk memperkuat praktik tata kelola yang bersih dan berintegritas. Dalam konteks hubungan principal–agent, e-government mempersempit asimetri informasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga meningkatkan persepsi publik bahwa proses layanan publik berjalan transparan dan bebas dari intervensi koruptif. Dengan demikian, digital governance berfungsi sebagai alat mitigasi korupsi secara sistemik.

Sejumlah penelitian empiris lima tahun terakhir mendukung argumen bahwa e-government berdampak positif terhadap persepsi antikorupsi. Temuan Maria and Halim (2021) dan Panao (2022) menunjukkan bahwa negara

dengan implementasi digital yang lebih maju memiliki tingkat persepsi korupsi yang lebih rendah. Bahkan laporan UN E-Government Survey (United Nations, 2022) menegaskan korelasi kuat antara tingginya indeks e-government dan meningkatnya persepsi publik terhadap integritas sektor publik.

Dalam konteks Asia Pasifik, percepatan layanan digital pascapandemi COVID-19 memperkuat hubungan tersebut. Negara yang berhasil mengintegrasikan layanan berbasis teknologi terbukti memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis:

H_1: E-government berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi antikorupsi di kawasan Asia Pasifik.

Persepsi antikorupsi mencerminkan sejauh mana publik dan pemangku kepentingan menilai tingkat integritas dan kebersihan birokrasi suatu negara. Persepsi yang menunjukkan rendahnya korupsi biasanya terkait dengan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mengelola sumber daya publik secara efektif. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, persepsi antikorupsi memainkan peran penting karena integritas sektor publik berpengaruh langsung pada kualitas perencanaan jangka panjang, efisiensi alokasi anggaran, dan stabilitas fiskal negara.

Secara teoretis, *Institutional Theory* menegaskan bahwa korupsi melemahkan kapasitas negara dalam mencapai tujuan pembangunan. Ketika tingkat korupsi dianggap rendah, kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, sehingga mendorong lingkungan kelembagaan yang lebih kondusif untuk implementasi program pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat menjalankan kebijakan ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan lebih konsisten karena sumber daya tidak bocor ke praktik rent-seeking. Sebaliknya, tingginya persepsi korupsi sering dikaitkan dengan kegagalan proyek, pemborosan anggaran, dan ketidakstabilan pelayanan publik, yang pada akhirnya menurunkan *sustainability performance*.

Penelitian empiris terbaru mendukung hubungan ini. Studi oleh Adjorlolo et al (2025) dan Baum et al (2024) menunjukkan bahwa negara dengan persepsi korupsi rendah memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang lebih baik, termasuk efektivitas mitigasi risiko iklim, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan tata kelola fiskal yang lebih disiplin. Laporan UNDP (2018) juga menegaskan bahwa integritas sektor publik merupakan prasyarat utama bagi negara untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam konteks Asia Pasifik, variasi tingkat korupsi antarnegara menjadikan persepsi antikorupsi sebagai determinan penting keberhasilan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan teori dan bukti tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_2: Persepsi antikorupsi berpengaruh positif signifikan terhadap sustainability performance pemerintah di kawasan Asia Pasifik.

E-government telah menjadi elemen strategis dalam transformasi administrasi publik modern, tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan integritas dan pengurangan praktik

korupsi. Melalui digitalisasi proses birokrasi, pemerintah mampu menyediakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan minim kontak fisik, sehingga mengurangi ruang terjadinya maladministrasi. Transparansi yang tercipta melalui sistem informasi digital memberi akses luas kepada masyarakat terhadap informasi anggaran, proyek pemerintah, hingga kinerja instansi. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa pemerintah bekerja secara bersih dan akuntabel.

Secara teoretis, hubungan tidak langsung antara e-government dan sustainability performance dapat dijelaskan melalui dua mekanisme besar. Pertama, pendekatan Institutional Theory menyatakan bahwa digital governance menciptakan struktur kelembagaan yang lebih kuat, yang mendorong perilaku birokrasi yang sesuai aturan dan responsif terhadap pengawasan publik. Kedua, teori , *Institutional Theory* menegaskan bahwa persepsi antikorupsi menjadi faktor kunci dalam efektivitas pembangunan berkelanjutan. Pemerintah yang dinilai memiliki integritas tinggi cenderung mampu mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran, mengurangi kebocoran anggaran, serta menciptakan stabilitas fiskal yang diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam konteks ini, persepsi antikorupsi berfungsi sebagai variabel mediasi yang menghubungkan implementasi e-government dengan peningkatan sustainability performance. Ketika masyarakat melihat bahwa digitalisasi layanan publik telah menekan peluang korupsi, kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. Kepercayaan publik tersebut mendorong efektivitas kebijakan dan memperkuat legitimasi program pembangunan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola. Negara dengan persepsi korupsi rendah juga terbukti memiliki kinerja yang lebih baik dalam memenuhi *Sustainable Development Goals* (SDGs), termasuk pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan layanan sosial, dan stabilitas ekonomi.

Bukti empiris memperkuat mekanisme mediasi ini. Penelitian terdahulu (Li and Shang, 2020; Zhang and Kaur, 2024; Zhao et al., 2021) menunjukkan bahwa e-government menurunkan tingkat korupsi, sementara studi Mungiu-Pippidi menemukan bahwa integritas publik berkorelasi positif dengan kinerja pembangunan berkelanjutan. SehinggaAmyulianthy et al (2022) menekankan bahwa integritas sektor publik merupakan prasyarat utama untuk keberhasilan kebijakan sustainability.

Dengan demikian, implementasi e-government yang efektif tidak hanya berdampak langsung pada peningkatan tata kelola publik, tetapi juga menciptakan efek tidak langsung melalui penguatan persepsi antikorupsi yang pada akhirnya meningkatkan sustainability performance pemerintah. Berdasarkan landasan teoritis dan empiris tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_3: E-government berpengaruh positif signifikan terhadap sustainability performance pemerintah melalui mediasi persepsi antikorupsi.

Pengaruh e-government terhadap persepsi antikorupsi tidak selalu bersifat otomatis atau seragam pada semua negara. Efektivitas digitalisasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola publik yang melingkupinya. *Good Public Governance* (GPG), yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, rule of law,

efektivitas, partisipasi, dan integritas birokrasi, berperan sebagai kondisi lingkungan yang menentukan seberapa optimal e-government mampu berfungsi sebagai instrumen antikorupsi. Dengan kata lain, digitalisasi akan memberikan manfaat maksimal ketika diterapkan dalam ekosistem governance yang kuat.

Secara teoritis, peran moderasi GPG dapat dijelaskan melalui *Institutional Theory* bahwa inovasi digital hanya dapat berjalan efektif ketika tertanam dalam nilai-nilai, regulasi, dan norma institusional yang mendukung integritas. Tanpa tata kelola yang baik, *digital tools* berpotensi hanya menjadi perubahan teknis yang tidak menyentuh akar masalah korupsi. Sehingga reformasi digital dan reformasi governance harus berjalan beriringan, karena satu perubahan tidak dapat menghasilkan perubahan signifikan tanpa didukung perbaikan lainnya. Dalam konteks ini, GPG bertindak sebagai katalis yang memperkuat dampak e-government terhadap peningkatan persepsi antikorupsi.

Beberapa penelitian terkini mendukung argumen bahwa kualitas governance memperkuat efektivitas e-government. Penelitian terdahulu (Cao et al., 2022; Pudjono et al., 2025; Yi & Qiu, 2025) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat akuntabilitas publik tinggi mampu memanfaatkan e-government secara lebih efektif untuk menekan korupsi. Studi M. M et al (2024) dan Mariotti and Marzano (2021)menemukan bahwa rule of law memperbesar dampak digital governance terhadap peningkatan kepercayaan publik. Ionașcu et al (2025) dan Mujiani & Abdurrosyid (2025) juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sektor publik bergantung pada integritas birokrasi dan efektivitas regulasi pengawasan.

Dalam konteks Asia Pasifik, variasi kualitas governance antarnegara menjadikan efek moderasi GPG relevan. Negara maju dengan governance kuat seperti Singapura, Australia, dan Selandia Baru menunjukkan bahwa e-government menghasilkan persepsi korupsi yang jauh lebih rendah dibandingkan negara dengan digitalisasi yang sama tetapi governance lemah. Hal ini menunjukkan bahwa GPG bukan sekadar faktor pendukung, tetapi elemen penentu dalam mengoptimalkan dampak digitalisasi birokrasi. Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, penelitian ini mengusulkan hipotesis berikut:

H_4: Good Public Governance memperkuat pengaruh positif e-government terhadap persepsi antikorupsi.

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel untuk menguji hubungan kausal antara e-government, *good public governance*, persepsi antikorupsi, dan *sustainability performance* di negara-negara kawasan Asia Pasifik. Pemilihan pendekatan kuantitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif, replikatif, dan dapat diuji secara statistik. Struktur data panel memungkinkan peneliti mengamati dinamika perubahan antarnegara dan antarwaktu, serta memberikan kemampuan untuk mengontrol heterogenitas yang tidak teramati pada masing-masing negara.

Penelitian ini dirancang sebagai *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan mekanisme dan interaksi antarvariabel kelembagaan dalam memengaruhi sustainability performance pemerintah. Desain ini sesuai dengan kerangka *Institutional Theory* yang menempatkan institusi digital, tata kelola publik, dan integritas birokrasi sebagai faktor kausal dalam kinerja pembangunan. Hubungan antarvariabel diuji melalui dua model regresi utama, yaitu model yang menjelaskan determinan persepsi antikorupsi dan model yang menjelaskan determinan *sustainability performance*.

Desain penelitian juga memasukkan unsur mediasi dan moderasi untuk menangkap hubungan tidak langsung dan kondisi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh antarvariabel. Persepsi antikorupsi digunakan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan pengaruh e-government terhadap *sustainability performance*. Sementara itu, *good public governance* digunakan sebagai variabel moderasi untuk menilai apakah dampak e-government terhadap integritas publik bergantung pada kualitas tata kelola negara. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana reformasi digital dan tata kelola bekerja secara simultan dalam memengaruhi pembangunan.

Pemilihan variabel penelitian berbasis pada indikator internasional yang kredibel, seperti UN E-Government Development Index (EGDI), Worldwide Governance Indicators (WGI), Corruption Perceptions Index (CPI), dan indikator multidimensi Balanced Scorecard untuk mengukur *sustainability performance*. Penggunaan sumber data global memungkinkan perbandingan yang valid antarnegara serta meningkatkan reliabilitas dan objektivitas hasil.

Secara keseluruhan, desain penelitian ini menggabungkan analisis kausal, pengujian mediasi dan moderasi, serta pemanfaatan data panel lintas negara untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran institusi digital dan tata kelola dalam mendorong kinerja pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.

Data dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel multi-negara yang berasal dari kawasan Asia Pasifik, dengan cakupan waktu tahun 2020–2023. Data yang dihimpun merupakan gabungan dari berbagai sumber internasional yang kredibel, meliputi United Nations, World Bank, Transparency International, serta indikator hasil komposit internal berdasarkan konsep Balanced Scorecard untuk sektor publik. Setiap baris data mewakili negara-tahun (*country-year observation*), sehingga struktur dataset memungkinkan analisis longitudinal untuk melihat dinamika kinerja pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sampel yang dijadikan penelitian merupakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik sebanyak 61 negara, dengan waktu pengamatan 4 tahun sehingga total observasi sebanyak 305. Pemilihan periode ini didasarkan pada ketersediaan data terbaru UN E-Government Survey (2020 & 2022) dan konsistensi World Governance Indicators (WGI) dan CPI hingga 2023 lalu juga memperhitungkan relevansi perkembangan pascapandemi dalam mempengaruhi transformasi digital dan tata kelola publik.

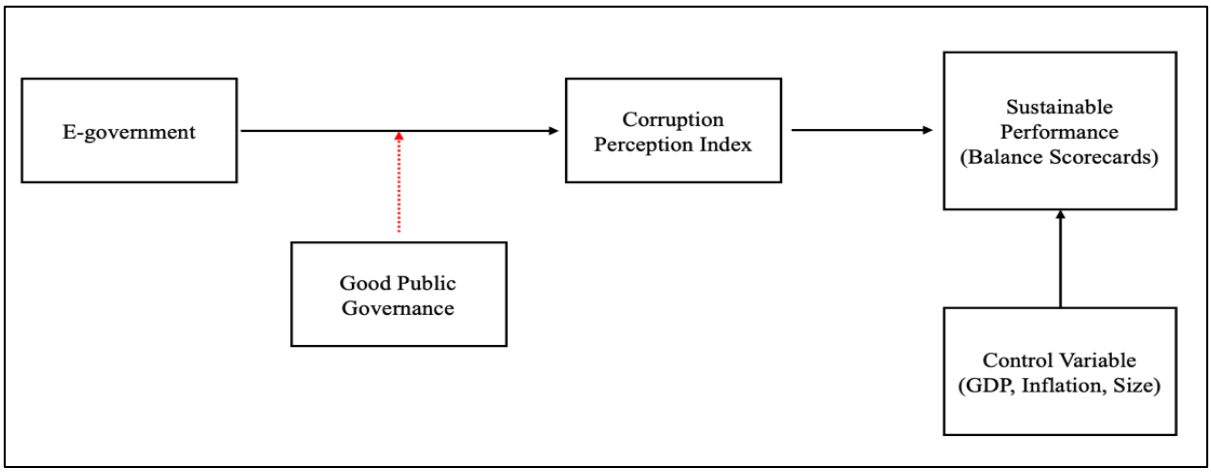
Model Penelitian

Penelitian ini memiliki lima (5) hipotesis penelitian yang dapat dijelaskan dalam dua (2) model penelitian berikut ini :

$$PERF_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 CPI_{it} + \alpha_2 EGOV_{it-1} + \alpha_3 GPG_{it} + \alpha_3 (EGOV_{it-1} \times GPG_{it}) + \alpha_4 GDP_{it} + \alpha_5 IFL_{it} + \alpha_4 SIZE_{it} + e \ldots (1)$$

$$CPI_{it} = \beta_0 + \beta_1 EGOV_{it-1} + \beta_2 GPG_{it} + \beta_3 (EGOV_{it-1} \times GPG_{it}) + \beta_4 GDP_{it} + \beta_5 IFL_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + e \ldots (2)$$

Sehingga dari model penelitian dapat diturunkan ke gambar kerangka penelitian sebagai berikut



Gambar 1 . Konseptual Framework Penelitian

Operasionalisasi Variabel

Variabel Independen

Independen variabel dalam penelitian ini menggunakan E-Government Development Index (EGDI) adalah indeks komposit yang disusun oleh United Nations melalui UN E-Government Survey, dan datanya tersedia secara resmi di UN Data Center (https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center). Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di suatu negara. EGDI merefleksikan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik digital yang efektif, transparan, inklusif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengukuran EGDI menggunakan tiga komponen utama, yaitu *Online Service Index* (OSI) yang menilai kualitas layanan digital pemerintah, *Telecommunication Infrastructure Index* (TII) yang mengukur kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta *Human Capital Index* (HCI) yang menggambarkan kapasitas pendidikan dan literasi masyarakat. Skor akhir EGDI merupakan rata-rata dari ketiga indeks tersebut dan menjadi indikator internasional yang banyak digunakan untuk menilai transformasi digital sektor publik.

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, *Sustainability performance* didefinisikan sebagai ukuran komprehensif mengenai keberhasilan suatu negara dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan melalui efektivitas tata kelola publik, kualitas layanan kepada warga, pengelolaan internal pemerintah, kemampuan

inovasi, serta ketahanan fiskal. Pengukuran *Sustainability performance* menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards* (BSC) yang dimodifikasi khusus untuk konteks pemerintahan/negara, sehingga memberikan gambaran multidimensi yang lebih relevan dibandingkan indikator tradisional seperti pertumbuhan ekonomi atau indeks tunggal pembangunan.

Penelitian ini mengembangkan lebih dalam penelitian oleh Cruz & Marques (2014) yang mengembangkan untuk pemerintah daerah, maka penelitian ini mencoba mengembangkan untuk level pemerintah negara Pendekatan BSC yang digunakan terdiri atas lima dimensi utama, yaitu: *Citizen/Public Service, Internal Process, Learning and Growth, Financial Stewardship*, dan *Public Impact*.

Dimensi pertama *Citizen/Public Service* dinilai melalui indikator pencapaian pendidikan penduduk usia dewasa (*upper secondary attainment*), yang mencerminkan kualitas layanan publik dasar bagi warga negara. Dimensi kedua *Internal Process* diukur melalui *Management Practices Index* dari World Bank yang menggambarkan efektivitas proses manajerial pemerintah. Selanjutnya dimensi ketiga *Learning and Growth* menggunakan Global Innovation Index, yang menilai kapasitas negara dalam mendorong inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Sementara itu, dimensi ke empat *Financial Stewardship* mencakup efektivitas pemerintah dalam mengelola belanja publik (*Government Spending*) sebagai bentuk akuntabilitas fiskal. Dimensi terakhir kelima *Public Impact* diukur melalui SDG Index, yang menunjukkan pencapaian negara terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Dengan struktur lima dimensi ini, *Sustainability performance* dalam penelitian ini dianggap daapat merepresentasikan kinerja pembangunan yang holistik, berorientasi publik, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan jangka panjang.

Variabel Moderasi

Penelitian ini menggunakan variabel Good Public Governance sebagai variabel Moderasi dimana menggunakan data dari Worldwide Governance Indicators (WGI) yang dipublikasikan oleh World Bank, yang menyediakan enam dimensi tata kelola publik untuk menilai kualitas institusi dan efektivitas pemerintahan di berbagai negara.

Namun, penelitian ini secara khusus mengecualikan dimensi *Control of Corruption* agar variabel tersebut dapat digunakan terpisah sebagai konstruk tersendiri. Dengan demikian, *Good Public Governance* didefinisikan sebagai kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kemampuan negara dalam menjamin partisipasi warga (*Voice and Accountability*), menjaga stabilitas politik (*Political Stability and Absence of Violence*), memastikan efektivitas layanan publik dan kualitas birokrasi (*Government Effectiveness*), menyediakan regulasi yang mendukung kegiatan ekonomi (*Regulatory Quality*), serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga (*Rule of Law*). Indikator-indikator ini menggambarkan seberapa baik institusi pemerintah menjalankan fungsi administratif dan regulatif secara transparan, responsif, dan dapat dipercaya. Dengan menggunakan lima dimensi

WGI tersebut, *Good Public Governance* dalam penelitian ini mencerminkan kapasitas pemerintahan untuk mengelola negara secara profesional, stabil, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan berkelanjutan, tanpa memasukkan unsur korupsi sebagai bagian dari konstruknya.

Variabel Mediasi

Persepsi antikorupsi dalam penelitian ini diukur menggunakan Corruption Perceptions Index (CPI) yang dipublikasikan oleh Transparency International melalui situs resmi https://www.transparency.org. CPI merupakan indeks global yang menilai tingkat persepsi korupsi di sektor publik suatu negara, berdasarkan penilaian para ahli, pelaku bisnis, dan sumber data kredibel internasional. Indeks ini tidak mengukur korupsi secara langsung, tetapi menilai seberapa besar korupsi dianggap terjadi dalam birokrasi, pelayanan publik, penegakan hukum, hingga kualitas institusi pemerintah.

CPI disajikan dalam skala 0 sampai 100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan persepsi korupsi yang lebih rendah. CPI menghimpun berbagai indikator seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, persekongkolan politik-bisnis, dan lemahnya mekanisme pengawasan.

Dalam konteks penelitian ini, persepsi korupsi digunakan sebagai variabel terpisah untuk menangkap tingkat integritas sektor publik, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap good governance maupun *sustainability performance* negara. Indikator ini penting karena korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan dan efisiensi pemerintahan. Dalam Tabel 1 berikut merupakan ringkasan operasionalisasi variabel dalam penelitian.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Kode	Operasionalisasi Variabel	Sumber data	Skala
1.	E-government (Alsaad, 2022 and Ullah et al., 2022)	$EGOV_{it-1}$	Average (Online Service Index + Telecommunica tion Infrastructure Index + Human Capital Index)	United Nation Data Center	Rasio
2.	Indeks Persepsi Korupsi (Martins et al., 2023 and Badur et al., 2024).	CPI_{it}	Skor persepsi korupsi tiap negara	Transparency International	Nominal
3.	Good Public Governance (Fhima et al., 2023 and Park & Kim, 2020)	GPG_{it}	1. Voice and Accountability (VA) – tingkat partisipasi warga, kebebasan berpendapat, dan kebebasan media 2. Political Stability and Absence of Violence (PS) – stabilitas politik dan risiko kekerasan/terorisme.	World Bank - Worldwide Governance Indicators	Rasio

No.	Variabel	Kode	Operasionalisasi Variabel	Sumber data	Skala
			3. Government Effectiveness (GE) – kualitas layanan publik, independensi birokrasi, kapasitas kebijakan. 4. Regulatory Quality (RQ) – kualitas peraturan yang mendukung kegiatan ekonomi dan kebebasan usaha. 5. Rule of Law (RL) – penegakan hukum, perlindungan hak properti, efektivitas aparat hukum.		
4.	Sustainability performance (Pereira & Oliveira, 2020); (Ma & Zhang, 2025); (Raji et al., 2025); (Brahimi et al., 2025); (Del-Aguila-Arcentales et al., 2022)	$PERF_{it}$	1. Citizen/Public Service (Educational Attainment) Mengukur kualitas layanan publik melalui pencapaian pendidikan penduduk usia 25+ sebagai representasi kemampuan negara menyediakan layanan dasar yang inklusif.	World Bank	Rasio
			2. Internal Process (Management Practices Index) Menilai efektivitas proses internal pemerintah, termasuk manajemen organisasi, koordinasi birokrasi, dan tata kelola operasional.	World Bank	Rasio
			3. Learning and Growth (Global Innovation Index) Menggambarkan kapasitas negara untuk berinovasi, membangun pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global.	World Intellectual Property Organization - United Nations	Rasio
			4. Financial Stewardship (Government Spending) Mencerminkan tanggung jawab fiskal pemerintah dalam mengelola anggaran secara efisien, efektif, dan berorientasi keberlanjutan.	World Bank	Rasio
			5. Public Impact (SDG Index) Mengukur dampak akhir kebijakan publik melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).	United Nations Sustainable Development Solutions Network	Nominal
5.	Gross Domestic Product (Groner	GDP_{it}	Nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi	World Bank	Ratio

No.	Variabel	Kode	Operasionalisasi Variabel	Sumber data	Skala
	& Moradi, 2024; Zheng & Chen, 2024)		suatu negara dalam periode tertentu, Semakin tinggi GDP, semakin besar kapasitas produksi dan daya beli ekonomi nasional		
6.	Inflation (Tan et al., 2023; Zaman et al., 2024)	IFL_{it}	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian selama periode tertentu, Mencerminkan penurunan daya beli uang	World Bank	Ratio
7.	Population of Country (Kanyako et al., 2024)	$Size_{it}$	Jumlah total penduduk yang tinggal di suatu negara pada periode tertentu.	World Bank	Ratio Ln (Total Population)

Sumber: Hasil Pengolahan Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil deskriptif statistik, *matrix correlation* dan juga pengujian analisis tes VIF dari data penelitian disajikan di dalam Tabel 2. Hasil statistik deskriptif menunjukkan karakteristik utama variabel penelitian untuk 61 negara Asia Pasifik selama periode observasi. Rata-rata nilai *sustainability performance* (PERF) berada pada 4.329 dengan standar deviasi 3.087, menggambarkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam pencapaian kinerja pembangunan berkelanjutan antarnegara. Nilai e-government (EGOV) memiliki mean 0.845 dan standar deviasi 0.725, mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam tingkat digitalisasi layanan publik di kawasan. Sementara itu, persepsi antikorupsi (CPI) memiliki mean 2.541 dan standar deviasi 1.978, menunjukkan variasi integritas sektor publik yang cukup tajam. Variabel good public governance (GPG) juga mencatatkan variasi moderat (mean 0.800; SD 0.798), menandakan perbedaan kualitas kelembagaan lintas negara. Variabel kontrol seperti GDP, inflasi, dan ukuran populasi (SIZE) juga menunjukkan variasi yang cukup lebar, mencerminkan heterogenitas kondisi ekonomi dan demografis di kawasan Asia Pasifik.

Tabel 2. Statistik Deskriptif, analisis korelasi dan uji VIF

Var	Mean	SD	1	2	3	4	5	6	7	8
PERF	4.329	3.087	1							
EGOV	0.845	0.725	0.181*	1						
CPI	2.541	1.978	0.23**	1.418*	1					
GPG	0.8	0.798	1.102**	-0.077**	0.148*	1				
GDP	14.850	13.689	0.149*	0.146	0.713***	0.485*	1			
INF	0.601	0.575	0.127**	0.269*	0.091*	-0.142	0.153**	1		
SIZE	0.65	0.54	0.145	0.236	1.325*	1.364*	1.321	0.236	1	
VIF	0.48		2.23	1.22	2,34	1.62	2.54	2.033	2.99	1

Notes: *sig at $\rho < 0.05$; **sig at $\rho < 0.01$; ***sig at $\rho < 0.001$

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Analisis korelasi Pearson digunakan untuk menilai keeratan hubungan antarvariabel. Hasil menunjukkan bahwa PERF berkorelasi positif dengan EGOV ($r = 0.181$; $p < 0.05$), yang mendukung dugaan bahwa digitalisasi pemerintahan berhubungan dengan peningkatan kinerja pembangunan. Korelasi positif juga ditemukan antara PERF dan CPI ($r = 0.230$; $p < 0.01$), mencerminkan bahwa negara dengan tingkat korupsi lebih rendah cenderung memiliki performa keberlanjutan yang lebih baik. Korelasi antara PERF dan GPG juga positif ($r = 1.102$; $p < 0.01$), konsisten dengan teori bahwa tata kelola berkualitas merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Tidak ditemukan koefisien korelasi yang mendekati ambang batas multikolinearitas (0.80), sehingga hubungan antarvariabel dapat dikatakan stabil dan tidak menimbulkan distorsi statistik. Selain itu, arah korelasi keseluruhan konsisten dengan Institutional Theory, memperkuat validitas konseptual model penelitian.

Untuk memastikan tidak adanya masalah multikolinearitas, dilakukan pengujian Variance Inflation Factor (VIF). Seluruh variabel menunjukkan nilai VIF berada di bawah 3, dengan nilai tertinggi 2.99 (SIZE) dan nilai terendah 1.22. Nilai ini jauh di bawah batas kritis 10 (Hair et al., 2019), sehingga dipastikan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas serius dan setiap variabel independen memberikan informasi yang unik dalam menjelaskan variasi persepsi anti-korupsi maupun sustainability performance. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif, korelasi, dan VIF menunjukkan bahwa dataset layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut dan mendukung keandalan model penelitian ini. Variasi yang cukup tajam antarvariabel juga memperkuat relevansi studi komparatif lintas negara, terutama untuk menganalisis pengaruh e-government, tata kelola, dan integritas publik terhadap sustainability performance di kawasan Asia Pasifik.

Selanjutnya, dalam Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian hipotesis di penelitian ini. Dimana hasil regresi pada Model 1 menunjukkan bahwa e-government berpengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainability performance* ($\beta = 0.325$; $p < 0.01$), mengindikasikan bahwa negara yang memiliki tingkat digitalisasi layanan publik lebih tinggi cenderung menunjukkan kinerja pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Temuan ini konsisten dengan asumsi *Institutional Theory* bahwa digitalisasi mampu memperkuat transparansi, efisiensi birokrasi, dan efektivitas alokasi sumber daya sehingga kinerja pemerintahan meningkat. Selain itu, persepsi antikorupsi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *sustainability performance* ($\beta = –0.193$; $p < 0.01$), yang berarti bahwa semakin rendah tingkat korupsi yang dipersepsikan publik, semakin tinggi performa keberlanjutan negara. Temuan ini menegaskan bahwa integritas sektor publik merupakan fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang.

Tabel 3. Multivariate Regression Analysis

Variabels	Model 1 (Sustain Perform Country)		Model 2 (Anti-Corrupt)	
	B	t-stat	β	t-stat
Constant	0.135***	3.214	0.238***	3.145
EGOVT	0.325***	1.991	0.245***	2.356
Corruption	-0.193***	2.353	-	-
GPG x EGOVT	0.224*	2.999	-	-
GDP	0.073	0.457	0.145	1.365
INF	0.123	1.214	0.457	1.332
SIZE	-0.204**	4.147	0.010	3.199
R^2	0.632		0.742	
R^2 adjusted	0.604		0.731	
F (ρ-value)	345.214***		332.125***	

Notes: *sig at $\rho < 0.05$; **sig at $\rho < 0.01$; ***sig at $\rho < 0.001$
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Good Public Governance (GPG) juga ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap sustainability performance (β = 0.204; p < 0.05). Hal ini menegaskan bahwa tata kelola publik yang baik, baik melalui rule of law, efektivitas regulasi, maupun stabilitas politik, memberikan lingkungan kelembagaan yang kondusif bagi pencapaian tujuan keberlanjutan. Variabel kontrol seperti GDP, inflasi, dan ukuran populasi tidak menunjukkan signifikansi berarti, menunjukkan bahwa dimensi institusional memiliki peran yang jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar kondisi ekonomi makro. Secara keseluruhan, Model 1 memiliki *explanatory power* yang kuat (R^2 = 0.632) dan signifikan pada tingkat 1%, sehingga dapat menjelaskan fenomena dengan baik.

Untuk Model 2, hasil regresi menunjukkan bahwa e-government berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi antikorupsi (β = 0.245; p < 0.001), menguatkan argumen bahwa digitalisasi administrasi publik mampu mengurangi peluang korupsi melalui otomasi, pelacakan digital, dan peningkatan transparansi. GPG juga ditemukan berpengaruh positif terhadap CPI, selaras dengan literatur yang menyatakan bahwa tata kelola yang kuat mempersempit ruang tindakan oportunistik para birokrat. Model ini juga memiliki daya jelaskan tinggi (R^2 = 0.742), mengindikasikan bahwa variabel institusional mampu menjelaskan secara komprehensif variasi persepsi korupsi antarnegara.

Pengujian Mediasi

Untuk menguji apakah persepsi antikorupsi bertindak sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara e-government dan *sustainability performance*, penelitian ini menggunakan pendekatan Baron dan Kenny (1986). Empat kondisi utama diuji untuk memastikan adanya efek mediasi.

Pertama, hasil Model 1 menunjukkan bahwa e-government memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sustainability performance (β = 0.325; p < 0.01). Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik, melalui transparansi, otomasi proses, dan pengurangan *discretionary power*, berkontribusi langsung

pada peningkatan performa pembangunan jangka panjang sebuah negara.

Kedua, Model 2 membuktikan bahwa e-government juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi antikorupsi ($\beta = 0.245$; $p < 0.001$), yang berarti bahwa negara-negara dengan *digital governance* yang lebih kuat cenderung dipersepsikan lebih bersih dari korupsi. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan peran digitalization dalam menutup ruang penyimpangan administratif melalui *digital traceability, open data*, serta peningkatan pengawasan publik.

Ketiga, variabel persepsi antikorupsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *sustainability performance* dalam Model 1 ($\beta = -0.193$; $p < 0.01$). Artinya, semakin rendah tingkat korupsi yang dipersepsikan publik, semakin baik kinerja pembangunan berkelanjutan suatu negara. Temuan ini konsisten dengan argumen bahwa integritas sektor publik merupakan fondasi strategis bagi implementasi kebijakan jangka panjang, efisiensi anggaran, dan keberhasilan capaian SDGs.

Keempat, koefisien pengaruh langsung e-government terhadap *sustainability performance* menurun ketika variabel CPI dimasukkan ke dalam model (dari $\beta = 0.325$ menjadi $\beta = 0.125$), mengindikasikan bahwa sebagian pengaruh *digital governance* terhadap *sustainability performance* bekerja melalui perbaikan persepsi antikorupsi. Dengan demikian, persepsi antikorupsi terbukti memediasi secara parsial hubungan antara e-government dan *sustainability performance*.

Secara konseptual, hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan kinerja pembangunan melalui efisiensi dan modernisasi layanan, tetapi juga melalui peningkatan integritas kelembagaan yang memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas implementasi program. Dalam kerangka *Institutional Theory*, temuan ini menggarisbawahi bahwa e-government berperan sebagai instrumen reformasi struktural yang memperbaiki pilar regulatif dan kognitif institusi negara, yang selanjutnya menurunkan perilaku koruptif dan mendorong peningkatan performa jangka panjang.

Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa e-government berkontribusi pada penurunan korupsi (D. Kim et al., 2024; Y. Kim et al., 2025; Martin & Hajnal, 2025) dan bahwa integritas publik merupakan determinan utama keberhasilan pembangunan (Kusuma et al., 2025; Mohammed, 2025; Sadik-Zada et al., 2024; Srivastava et al., 2024). Hasil mediasi ini memperkuat argumen bahwa perbaikan kinerja pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik sangat bergantung pada kemampuan negara memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat integritas sistem pemerintahan.

Pengujian Moderasi

Untuk menguji peran moderasi tata kelola publik (*Good Public Governance*/GPG) dalam hubungan antara e-government dan persepsi antikorupsi, penelitian ini memasukkan variabel interaksi EGOV × GPG ke dalam Model 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien interaksi tersebut signifikan secara statistik ($\beta = -0.224$; $p < 0.05$), mengindikasikan bahwa GPG memperkuat pengaruh e-government dalam meningkatkan persepsi antikorupsi. Dengan kata

lain, pengaruh *digital governance* terhadap persepsi antikorupsi tidak bersifat konstan, tetapi bergantung pada kualitas institusi negara.

Temuan ini menunjukkan bahwa e-government menghasilkan dampak antikorupsi yang lebih besar pada negara-negara dengan tata kelola publik yang kuat, ditandai oleh sistem hukum yang efektif, birokrasi profesional, stabilitas politik, dan regulasi yang berkualitas. Sebaliknya, pada negara dengan governance yang lemah, efek e-government terhadap persepsi korupsi menjadi lebih kecil atau bahkan tidak signifikan. Hal ini menguatkan argumen dalam *Institutional Theory* bahwa teknologi digital tidak dapat menggantikan fungsi institusi formal; ia hanya bekerja optimal ketika berada dalam lingkungan kelembagaan yang mendukung integritas dan akuntabilitas.

Secara empiris, temuan ini konsisten dengan literatur yang menekankan pentingnya konteks institusional dalam keberhasilan digitalisasi sektor publik. Penelitian (Baum et al., 2024; Chen & Ganapati, 2023; Ismail et al., 2020; Martin & Hajnal, 2025; Sulistyaningsih et al., 2025) menunjukkan bahwa rule of law dan akuntabilitas publik memperkuat efektivitas e-government dalam menekan peluang tindakan koruptif. Dalam konteks Asia Pasifik, hasil moderasi ini menjelaskan negara yang memiliki struktur governance yang matang, memperoleh manfaat jauh lebih besar dari digitalisasi dibandingkan negara dengan tingkat governance rendah, meskipun tingkat digitalisasi relatif sama.

Hasil interaksi negatif dan signifikan dalam penelitian ini mencerminkan bahwa peningkatan e-government akan lebih efektif dalam mengurangi persepsi korupsi ketika berada di lingkungan governance yang kuat. Artinya, semakin tinggi kualitas governance, semakin besar peningkatan persepsi antikorupsi yang dihasilkan oleh digitalisasi. Dalam kerangka *Institutional Theory* (*complementarity of reforms*), digitalisasi dan tata kelola bukanlah instrumen yang bekerja secara terpisah; keduanya saling memperkuat. Ketika governance kuat, digital tools bukan sekadar menyediakan layanan publik, tetapi juga menciptakan mekanisme disiplin administratif yang mendorong transparansi internal, pengawasan otomatis, dan pengurangan *discretionary power* pejabat.

Temuan ini memiliki implikasi penting: reformasi digital dan reformasi tata kelola tidak dapat dilakukan secara terpisah. Investasi dalam digitalisasi layanan publik tanpa perbaikan governance berisiko menghasilkan "e-government tanpa integritas," yakni situasi ketika layanan digital tersedia tetapi tidak mampu meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, ketika governance kuat, e-government dapat berfungsi sebagai katalis perubahan institusional, memperkokoh integritas administrasi publik dan menghasilkan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap kinerja pemerintahan.

Dengan demikian, hasil moderasi ini menegaskan bahwa *Good Public Governance* adalah prasyarat penting bagi efektivitas e-government dalam menurunkan persepsi korupsi, sekaligus memperkuat model teoretis penelitian bahwa pilar governance memainkan peran kunci dalam dinamika pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur e-

government, tata kelola publik, dan pembangunan berkelanjutan dengan menunjukkan bahwa kualitas institusi merupakan faktor kunci dalam menjelaskan variasi sustainability performance di kawasan Asia Pasifik. Pertama, pengaruh positif e-government terhadap *sustainability performance* memperkuat argumentasi bahwa digitalisasi bukan hanya instrumen teknis, tetapi merupakan reformasi kelembagaan yang berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik, efisiensi pengelolaan anggaran, dan kapabilitas pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Hasil ini konsisten dengan pandangan *Institutional Theory* yang menempatkan teknologi digital sebagai penguatan pilar regulatif dan kognitif institusi, sehingga meningkatkan kapasitas negara untuk menyediakan layanan yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi keberlanjutan.

Kedua, hasil mediasi menunjukkan bahwa sebagian pengaruh e-government terhadap *sustainability performance* bekerja melalui perbaikan persepsi antikorupsi. Mekanisme ini menegaskan bahwa capaian pembangunan yang kuat tidak hanya bergantung pada modernisasi administratif, tetapi juga pada integritas sektor publik. Negara-negara yang berhasil menekan peluang korupsi melalui digital traceability, otomasi proses, dan keterbukaan informasi akan memperoleh legitimasi publik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa korupsi merupakan hambatan struktural terbesar bagi pencapaian SDGs, dan integritas merupakan fondasi utama dari governance yang berfungsi baik.

Ketiga, peran moderasi Good Public Governance menunjukkan bahwa digitalisasi hanya efektif dalam konteks tata kelola yang kuat. Efek interaksi antara EGOV dan GPG yang signifikan mengindikasikan bahwa negara dengan rule of law kuat, birokrasi profesional, dan regulasi yang stabil mampu memanfaatkan e-government secara optimal untuk meningkatkan persepsi antikorupsi. Sebaliknya, di negara dengan governance yang lemah, digitalisasi berisiko menghasilkan "e-government tanpa integritas," di mana teknologi hadir tetapi tidak mampu memperbaiki kepercayaan publik maupun mengurangi korupsi. Temuan ini mendukung *Institutional Theory*, yang menegaskan bahwa reformasi digital dan reformasi kelembagaan harus berjalan simultan agar menghasilkan perubahan substantif.

Selain itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tata kelola publik memiliki efek langsung yang kuat terhadap sustainability performance. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas regulasi, kapasitas birokrasi, dan stabilitas politik tetap menjadi fondasi bagi keberhasilan pembangunan, bahkan dalam era digital sekalipun. Dalam konteks Asia Pasifik, di mana kesenjangan governance antarnegara sangat tinggi, temuan ini memberikan penjelasan mengapa negara maju dengan governance mapan menunjukkan kinerja berkelanjutan yang jauh lebih baik dibandingkan negara berkembang meski memiliki tingkat digitalisasi yang relatif meningkat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan

merupakan hasil interaksi antara inovasi digital, integritas institusional, dan tata kelola publik yang kuat. Implikasi penting bagi pembuat kebijakan adalah bahwa investasi dalam teknologi digital harus diiringi dengan reformasi kelembagaan yang memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kapasitas birokrasi. Tanpa fondasi tersebut, manfaat e-government terhadap kinerja pembangunan tidak akan optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa e-government, tata kelola publik, dan persepsi antikorupsi merupakan pilar kelembagaan yang saling mempengaruhi dalam membentuk sustainability performance negara-negara Asia Pasifik. E-government terbukti meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan sekaligus memperbaiki persepsi antikorupsi, menegaskan peran digitalisasi sebagai instrumen reformasi struktural dalam pemerintahan modern. Persepsi antikorupsi memediasi sebagian hubungan tersebut, menandakan bahwa peningkatan integritas publik merupakan mekanisme penting yang menjembatani efektivitas digital governance terhadap pembangunan jangka panjang. Selain itu, Good Public Governance memperkuat dampak e-government terhadap persepsi antikorupsi, menunjukkan bahwa teknologi hanya efektif ketika dioperasikan dalam lingkungan institusional yang stabil, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai melalui digitalisasi semata, tetapi membutuhkan fondasi tata kelola publik yang kuat dan integritas institusional yang tinggi. Implikasi kebijakan menunjukkan perlunya pendekatan terpadu antara transformasi digital dan reformasi governance agar manfaat pembangunan dapat dicapai secara optimal di kawasan Asia Pasifik.

Implikasi Teori

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi teoretis penting terhadap literatur e-government, tata kelola publik, dan pembangunan berkelanjutan. Pertama, studi ini memperluas penerapan Institutional Theory dengan menunjukkan bahwa e-government bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan mekanisme reformasi institusional yang memperkuat pilar regulatif dan kognitif negara. Temuan ini menegaskan bahwa digital governance berfungsi sebagai alat untuk mengurangi asimetri informasi, meningkatkan transparansi, serta membentuk perilaku birokrasi yang lebih akuntabel, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan sustainability performance pemerintah.

Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan mengintegrasikan e-government, good public governance, dan persepsi antikorupsi dalam satu kerangka Balanced Scorecard sektor publik. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menguji hubungan parsial antarvariabel, studi ini menunjukkan bahwa persepsi antikorupsi berperan sebagai mekanisme mediasi institusional yang menjembatani transformasi digital dengan kinerja pembangunan berkelanjutan. Hal ini memperkaya literatur governance dengan menegaskan bahwa peningkatan kinerja publik tidak hanya

ditentukan oleh efisiensi administratif, tetapi juga oleh legitimasi dan integritas institusional.

Ketiga, temuan moderasi *Good Public Governance* memperkuat argumen *complementarity of governance reforms*, di mana reformasi digital dan reformasi kelembagaan harus berjalan secara simultan. Secara teoretis, hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas e-government bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada kualitas institusi publik. Dengan demikian, penelitian ini menantang asumsi deterministik teknologi dan menegaskan bahwa teknologi digital tidak dapat menggantikan peran institusi formal, melainkan hanya memperkuatnya.

Keempat, penggunaan Balanced Scorecard yang dimodifikasi untuk level negara memperluas literatur pengukuran kinerja pemerintah. Dengan mengintegrasikan dimensi *citizen/public service, internal process, learning and growth, financial stewardship,* dan *public impact*, maka penelitian ini menawarkan pendekatan multidimensi yang lebih komprehensif untuk menjelaskan *sustainability performance* dibandingkan indikator tunggal ekonomi atau governance. Kontribusi ini memperkaya diskursus teoretis mengenai bagaimana kinerja pembangunan berkelanjutan seharusnya diukur dalam studi lintas negara.

Implikasi Manajerial

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang kuat bagi pembuat kebijakan dan manajer publik, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Pertama, hasil penelitian menegaskan bahwa investasi dalam e-government harus diposisikan sebagai kebijakan strategis jangka panjang, bukan sekadar proyek digitalisasi administratif. Pemerintah yang mengadopsi e-government secara konsisten mampu meningkatkan transparansi, mengurangi discretionary power birokrasi, serta memperkuat kepercayaan publik, yang pada akhirnya mendorong *sustainability performance*.

Kedua, temuan mediasi menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuannya menurunkan persepsi korupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi e-government disertai dengan kebijakan keterbukaan data, audit digital, dan sistem pengawasan elektronik yang efektif. Digitalisasi layanan publik tanpa integritas kelembagaan berisiko menghasilkan e-government yang bersifat kosmetik dan tidak berdampak pada peningkatan kinerja pembangunan.

Ketiga, hasil moderasi Good Public Governance memberikan pesan kebijakan yang penting bahwa penguatan tata kelola publik merupakan prasyarat bagi efektivitas e-government. Reformasi digital akan memberikan dampak maksimal ketika didukung oleh rule of law yang kuat, birokrasi profesional, regulasi yang konsisten, serta stabilitas politik. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mengadopsi pendekatan terpadu yang mengombinasikan reformasi teknologi dengan reformasi institusional.

Keempat, bagi lembaga perencana pembangunan dan kementerian keuangan, pendekatan Balanced Scorecard sektor publik yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi strategis untuk memantau kinerja pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah

menilai dampak kebijakan tidak hanya dari sisi output ekonomi, tetapi juga dari kualitas layanan publik, kapasitas inovasi, dan pencapaian SDGs secara holistik.

Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan teoretis yang signifikan, beberapa keterbatasan perlu dicatat. Pertama, penelitian ini menggunakan data sekunder berbasis indeks internasional, seperti EGDI, CPI, dan WGI, yang merefleksikan persepsi dan agregasi indikator. Meskipun indeks tersebut kredibel dan banyak digunakan, pendekatan ini berpotensi mengaburkan dinamika mikro institusional di masing-masing negara. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan data makro dengan data mikro atau studi kasus mendalam guna memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual.

Kedua, ruang lingkup penelitian terbatas pada kawasan Asia Pasifik, sehingga generalisasi temuan ke kawasan lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Perbedaan tingkat kematangan institusi, budaya birokrasi, dan sistem politik dapat memengaruhi efektivitas e-government dan governance. Oleh karena itu, penelitian lintas kawasan atau studi komparatif global menjadi agenda riset yang penting ke depan.

Ketiga, meskipun penelitian ini menggunakan data panel, pendekatan kausalitas masih bersifat asosiatif. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang lebih kuat secara kausal, seperti dynamic panel model, instrumental variables, atau pendekatan quasi-experimental, untuk memperkuat inferensi hubungan sebab-akibat.

Keempat, model penelitian ini berfokus pada faktor institusional internal negara. Penelitian mendatang dapat memperluas kerangka dengan memasukkan faktor eksternal, seperti tekanan global, peran organisasi internasional, geopolitik digital, atau kapasitas fiskal negara, untuk memahami sustainability performance secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdelsalam, H. M. E., ElKadi, H. A., & Gamal, S. (2010). Setback and remedy of local e-government projects. *Proceedings of the 4th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, 66–72. https://doi.org/10.1145/1930321.1930336

Abdulkareem, A. K., & Mohd Ramli, R. (2022). Does trust in e-government influence the performance of e-government? An integration of information system success model and public value theory. *Transforming Government: People, Process and Policy*, *16*(1), 1–17. https://doi.org/10.1108/TG-01-2021-0001

Addink, H. (2019). *Good Governance Concept and Context* (First Edit). Oxford University Press. https://doi.org/DOI:10.1093/oso/9780198841159.001.0001

Adjorlolo, G., Tang, Z., Wauk, G., Adu Sarfo, P., Braimah, A. B., Blankson Safo, R., & N-yanyi, B. (2025). Evaluating Corruption-Prone Public Procurement Stages for Blockchain Integration Using AHP Approach. *Systems*, *13*(4), 267. https://doi.org/10.3390/systems13040267

Akbar, R., Pilcher, R. A., & Perrin, B. (2015). Implementing performance measurement systems: Indonesian local government under pressure. *Qualitative Research in Accounting and Management*, *12*(1), 3–33. https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2013-0013

Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). Performance measurement in Indonesia: the case of local government. In *Pacific Accounting Review* (Vol. 24, Number 3). https://doi.org/10.1108/01140581211283878

Amyulianthy, R., Muda, R., Said, J., & Setyaningrum, D. (2022). Measuring Good Public Governance

in the Local Governments of Indonesia: A Multidimensional Index. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, *17*(2), 201–227. https://doi.org/10.24191/apmaj.v17i2-07

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. In *Journal of Personality and Social Psychology* (Vol. 51, Number 6).

Baum, A., Hacknay, C., Medas, P., & Sy, M. (2024). Governance and state-owned enterprises: how costly is corruption? *Economics of Governance*, *25*(2), 181–208. https://doi.org/10.1007/s10101-024-00311-1

Bhaskar, P., Vinay, M., & Joshi, A. (2021). *E-Government Adoption Among Employees* (pp. 20–43). https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4180-7.ch002

Biscione, A., de Felice, A., & Porcelli, F. (2025). Local administrations and the procurement of performance. Evidence from English local authorities. *Economic Systems*, *49*(3), 101312. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2025.101312

Cao, H., Zhang, L., Qi, Y., Yang, Z., & Li, X. (2022). Government auditing and environmental governance: Evidence from China's auditing system reform. *Environmental Impact Assessment Review*, *93*, 106705. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2021.106705

Chen, C., & Ganapati, S. (2023). Do transparency mechanisms reduce government corruption? A meta-analysis. *International Review of Administrative Sciences*, *89*(1), 257–272. https://doi.org/10.1177/00208523211033236

Cruz, N. F. da, & Marques, R. C. (2014). Scorecards for sustainable local governments. *Cities*, *39*, 165–170. https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.01.001

Del-Aguila-Arcentales, S., Alvarez-Risco, A., Jaramillo-Arévalo, M., De-La-cruz-diaz, M., & Anderson-Seminario, M. de las M. (2022). Influence of Social, Environmental and Economic Sustainable Development Goals (SDGs) over Continuation of Entrepreneurship and Competitiveness. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *8*(2). https://doi.org/10.3390/joitmc8020073

Dhaoui, I. (2022). E-Government for Sustainable Development: Evidence from MENA Countries. *Journal of the Knowledge Economy*, *13*(3), 2070–2099. https://doi.org/10.1007/s13132-021-00791-0

Fhima, F., Nouira, R., & Sekkat, K. (2023). How does corruption affect sustainable development? A threshold non-linear analysis. *Economic Analysis and Policy*, *78*, 505–523. https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.03.020

Gan, X., Xiang, S., Shuang, H. E., & Wen, T. (2025). Towards sustainable rural development: Characteristics and influencing factors of spatial correlation network of China's rural digitalization development. *Sustainable Futures*, *10*. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100901

Husein, L. A., Mushtaha, E. S., Alsyouf, I., & Obaideen, K. (2025). Advancing SDGs with IoT: Enhancing thermal comfort and energy efficiency- A bibliometric study. In *Sustainable Futures* (Vol. 10). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100873

Ionașcu, A. E., Hordofa, D. F., Dănilă, A., Spătariu, E. C., Burcă (Olteanu), A. L., & Horga, M. G. (2025). ESG Performance in the EU and ASEAN: The Roles of Institutional Governance, Economic Structure, and Global Integration. *Sustainability*, *17*(17), 7997. https://doi.org/10.3390/su17177997

Ismail, Ah. Fathonih, Hadi Prabowo, Sri Hartati, & Finny Redjeki. (2020). Transparency and Corruption: Does E-Government Effective to Combat Corruption? *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, *24*(4), 5396–5404. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201636

Kaiser, Z. R. M. A. (2024). Smart governance for smart cities and nations. *Journal of Economy and Technology*, *2*, 216–234. https://doi.org/10.1016/j.ject.2024.07.003

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1991). *The Balanced Scorecard.pdf*.

Kim, D., Shin, D., Lee, J., & Noh, G. (2024). Sustainability from institutionalism: determinants of Korean companies' ESG performances. *Asian Business & Management*, *23*(3), 393–425. https://doi.org/10.1057/s41291-024-00271-8

Kim, Y., Harding, A., & Subramaniam, M. (2025). *Toward Inclusive E-Government Services: Building Better Digital Literacy Infrastructure and Institutional Support for Marginalized Communities*. https://doi.org/10.24251/HICSS.2025.802

Klischewski, R., & Lessa, L. (2015). Sustainability of E-Government Success. In *Public Affairs and Administration* (pp. 294–313). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8358-7.ch014

Kusuma, G. W., Rochmanto, H. B., Priyanto, Hastuti, F. T., & Nurmalasari, N. (2025). Analisis Latent Dirichlet Allocation (Lda) Terhadap Isu Green Insurance Di Media Digital Untuk Mendukung Strategi Keberlanjutan. *Jurnal Riset Bisnis*, *9*(1).

Li, Y., & Shang, H. (2020). Service quality, perceived value, and citizens' continuous-use intention regarding e-government: Empirical evidence from China. *Information & Management*, *57*(3), 103197. https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103197

M. M, K., Hidayah, I., Pramono, S. E., & Sutopo, Y. (2024). How Effective Leadership Mediates the Influence of Organizational Culture, Governance, and Integrity on Employee Performance. *Journal of Ecohumanism*, *3*(8). https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4844

Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Maria, E., & Halim, A. (2021). E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, *5*(1), 40–58. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789

Maria, E., & Halim, A. (2025). Institutional readiness and resistance to AI-based accounting platforms: evidence from Indonesian local governments. *Transforming Government: People, Process and Policy*. https://doi.org/10.1108/TG-06-2025-0176

Mariotti, S., & Marzano, R. (2021). Institutions, Corporate Governance, and Internationalization of State-owned Enterprises in a Varieties of Capitalism Framework. In *The Multiple Dimensions of Institutional Complexity in International Business Research* (pp. 107–127). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1745-886220210000015008

Martin, J. P., & Hajnal, Á. (2025). Trials and Errors: Limitations of Anti-Corruption and Rule-of-Law Policies in the Context of Systemic Corruption. The Case of Hungary. *Public Integrity*, 1–16. https://doi.org/10.1080/10999922.2025.2554409

Meiyanti, R., Utomo, B., Sensuse, D. I., & Wahyuni, R. (2018). e-Government Challenges in Developing Countries: A Literature Review. *2018 6th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 1–6. https://doi.org/10.1109/CITSM.2018.8674245

Mohammed, K. S. (2025). New development: E-government, eco-innovation, and public policies—shaping transparency, accountability, and corruption control in the EU. *Public Money & Management*, 1–5. https://doi.org/10.1080/09540962.2025.2597949

Mujiani, S., & Abdurrosyid, M. (2025). Indonesian Savings And Loan Cooperatives: Determinants Of Financial Statement Quality. *Jurnal Riset Bisnis*, *9*(1).

Mutula, S. M. (n.d.). E-Government's Role in Poverty Alleviation. In *Cases on Developing Countries and ICT Integration* (pp. 104–122). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-60960-117-1.ch011

Nasser, B., Eleyan, D., & Alkhateeb, M. (2022). *E-Government Sustainability & Governance : A General Framework*. (May).

Nurdin, N., Scheepers, H., & Stockdale, R. (2022). A social system for sustainable local e-government. *Journal of Systems and Information Technology*, *24*(1), 1–31. https://doi.org/10.1108/JSIT-10-2019-0214

Panao, R. A. L. (2022). Thick as thieves? Corruption, institutional trust, and investment locations. *Asian Journal of Comparative Politics*, *7*(4), 1143–1162. https://doi.org/10.1177/20578911211004766

Pudjono, A. N. S., Wibisono, D., & Fatima, I. (2025). Advancing local governance: a systematic review of performance management systems. *Cogent Business & Management*, *12*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2442545

Sadik-Zada, E. R., Gatto, A., & Niftiyev, I. (2024). E-government and petty corruption in public sector service delivery. *Technology Analysis & Strategic Management*, *36*(12), 3987–4003. https://doi.org/10.1080/09537325.2022.2067037

Scott, W. R. (2014). *INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS FOURTH EDITION*. Sage.

Setyaningrum, D. (2017). E-Government as an Anti-Corruption Tool: Experience from Indonesia. *GATR Accounting and Finance Review*, *2*(4), 32–39. https://doi.org/10.35609/afr.2017.2.4(4)

Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *10*(2), 184–205. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10

Sofyani, H., Akbar, R., & Ferrer, R. C. (2018). 20 years of performance measurement system (PMS) implementation in indonesian local governments: Why is their performance still poor? *Asian Journal of Business and Accounting*, *11*(1), 151–184. https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6

Srivastava, S. K., Srivastava, P. R., & Zhang, J. Z. (2024). E-Government And Corruption: Is Accountability A Bridge? *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, *34*(1), 46–63. https://doi.org/10.1080/10919392.2024.2303943

Sulistyaningsih, E., Pandansari, T., Kusbandiyah, A., & Hapsari, I. (2025). Determinasi Kinerja Keuangan: Peran Moderasi Dewan Komisaris Independen. *Jurnal Riset Bisnis*, *9*(1).

Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index*. www.transparency.org/cpi

UNDP. (2018). Governance Principles, Institutional Capacity and Quality. In *United Nations Development Programme* (Vol. 08, Number 14). https://doi.org/10.4236/tel.2018.814196

United Nations. (2022). *E-Government Survey*. https://publicadministration.un.org/en/

van Doeveren, V. (2011). Rethinking Good Governance: Identifying Common Principles. *Public Integrity*, *13*(4), 301–318. https://doi.org/10.2753/PIN1099-9922130401

Yi, C., & Qiu, X. (2025). From local government to local governance: A systematic literature review and future research agenda. *Australian Journal of Public Administration*, *84*(1), 102–124. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12644

Zattoni, A., & Cuomo, F. (2008). Why adopt codes of good governance? A comparison of institutional and efficiency perspectives. *Corporate Governance: An International Review*, *16*(1), 1–15. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00661.x

Zehri, C., Mohammed El Amin, B., kadja, A., Inaam, Z., & Sekrafi, H. (2024). Exploring the nexus of decent work, financial inclusion, and economic growth: A study aligned with SDG 8. *Sustainable Futures*, *7*. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100213

Zhang, M., & Kaur, M. (2024). Toward a theory of e-government: Challenges and opportunities, a literature review. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, *8*(10), 7707. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7707

Zhang, X. (2019). *Good Governance, Good Enough Governance and Governance with Rights First*. UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Zhao, H., Ahn, M. J., & Manoharan, A. P. (2021). E-Government, Corruption Reduction and the Role of Culture. *International Journal of E-Planning Research*, *10*(3), 86–104. https://doi.org/10.4018/IJEPR.20210701.oa6

Zhao, X., & Xu, H. D. (2015). E-Government and Corruption: A Longitudinal Analysis of Countries. *International Journal of Public Administration*, *38*(6), 410–421. https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942736